

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SD, SMP, dan SMA swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau belum dapat terlaksana dengan baik. Dari 6 (enam) sekolah yang diteliti hanya 2 (dua) sekolah yang mengikutsertakan guru sekolah tersebut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu masih banyak guru – guru sekolah swasta yang masih belum mengenal apa itu BPJS Ketenagakerjaan berikut program yang ditawarkan. Sebagian besar guru – guru sekolah swasta masih bergantung pada gaji yang diterimanya dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari, juga dalam menanggung segala resiko yang ada baik untuk diri sendiri maupun keluarga.
2. Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yaitu:
 - 1) kurangnya sosialisasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan berikut program yang ditawarkan sehingga dalam

penelitian, penulis masih menemukan ada sekolah swasta yang guru – guru nya sama sekali belum mengetahui apa itu BPJS Ketenagakerjaan berikut programnya.

- 2) Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bagan Sinembah baru beroperasi bulan Juli 2017 (kurang lebih 4 Bulan masa operasi) dikarenakan Kantor BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan Kantor yang dulunya berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten yang kemudian Pindah ke Bagan Sinembah. Akibatnya dibutuhkan waktu dalam proses penyesuaian, kurangnya SDM di kantor Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bagan Sinembah juga memperlambat kinerja Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan tersebut.
- 3) Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan juga masih sulit untuk dilakukan karena kendala finansial masing – masing sekolah atau instansi yang ada.
- 4) Kesadaran mengenai pentingnya memiliki atau mengikuti jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan diri dan keluarga masih sangat kurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dengan sudah beroperasinya Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bagan Sinembah kurang lebih 4 bulan, diharapkan dapat memberi dampak yang baik khususnya untuk kemajuan dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, khususnya dalam memberikan sosialisasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan program yang ditawarkan itu sendiri. Untuk itu penulis juga memberikan saran – saran yang diharapkan dapat berguna bagi guru – guru dan instansi Pendidikan Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, antara lain:

1. Yayasan yang menaungi sekolah swasta yang ada agar berperan aktif dalam mencari informasi dan memberikan sosialisasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan beserta program yang ditawarkan.
2. Guru – guru sekolah swasta juga perlu mengambil peran aktif dalam mencari informasi – informasi yang ada mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan program yang ditawarkan melalui perangkat elektronik yang sudah maju saat ini, karena apabila pihak sekolah tidak memungkinkan untuk mendaftarkan guru – guru yang ada ke BPJS

Ketenagakerjaan maka guru – guru dapat mendaftarkan dirinya sendiri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

3. Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja maupun melalui dinas – dinas terkait lainnya juga perlu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya jaminan sosial nasional terlebih BPJS Ketenagakerjaan dan program yang ditawarkan.
4. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan juga perlu melakukan sosialisasi mendalam mengenai apa itu BPJS Ketenagakerjaan beserta Program – programnya serta memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan itu sendiri, sehingga masyarakat tidak salah mengartikan dan memahaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul R, Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta Barat.
- Asikin, Zainal, dkk. 2010, *Dasar – dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asyahdie, Zaeni, 2008, *Aspek – aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- John Rawls, 2016, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Manullang, Sedjun, 2001, *Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta Barat.
- Patuan Lubis, Rizal, 1994, *Kilas Balik dan Perkembangan Jamsostek*, PT ASTEK (Persero), Jakarta.
- Rusli, Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Jakarta.
- Sunindhia, Ninik Widiyanti, 1988, *Masalah PHK dan Pemogokan*, PT BINA AKSARA, Jakarta.
- Supriyanto, Hari, 2013, *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Triyanto, Djoko, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Penerbit Mandar Maju.
- Wahab, Julaini, 2001, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wahyudi, Eko, Wiwin Yulianingsih, Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

- Kurniawan, Nanang, M. Akhyar, Ranto H.S, 2013, “Ungan Pengalaman Mengajar Dan Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Kinerja

Guru Smk Swasta Se-Kecamatan Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012”, Jurnal Nosel, Vol 1 No 4, Universitas Sebelas Maret.

Yoyok Eko Suseno, 2013, “Perbedaan Persepsi antara Siswa Sekolah Negeri dan Swasta terhadap Pembelajaran Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Studi Pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Ngawi dengan SMP Ma’arif Ngawi)”, Jurnal Pendidikan Jasmani, Vol 1 No 1, Universitas Negeri Surabaya.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Internet:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2017, Kabupaten Rokan Hilir dalam Angka 2017 <https://rohilkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/2>, diakses 9 November 2017.

Bagian Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Rokan Hilir, Data Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, <http://www.rohilkab.go.id/profil-sosialbudaya-12-Pendidikan.html>, diakses 15 September 2017

BPJS Ketenagakerjaan, Sejarah, <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, diakses 28 September 2017.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>, diakses 12 September 2017.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim, <http://www.rohilkab.go.id/mainmenu-7-Geografis.html>, diakses 28 September 2017

Peraturan Perundang-Undangan:

Arianto, Budi, 2006, *Himpunan Lengkap Undang-Undang bidang Perburuhan*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42).

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239).

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253).

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29)

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1301).